

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Pasal 472 menyebutkan :” (1) *Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, (2) Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Agama*” serta Pasal 473 menyebutkan: “ *Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara*”.

Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu, Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama;
3. Pengelolaan Barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Kementerian Agama;
5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di Daerah;
6. Pelaksanaan Kegiatan Teknis dari Pusat sampai ke Daerah;
7. Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan pengembangan di Bidang Agama dan Keagamaan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
9. Pelaksanaan Dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 pasal 3, 4 dan 5, maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

2. Tugas

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

B. VISI DAN MISI KEMENTERIAN AGAMA

B.1 Visi Kementerian Agama

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, visi Kementerian Agama 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

B.2 Misi Kementerian Agama

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Kementerian Agama adalah :

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengalaman Ajaran Agama;
2. Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama;
3. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan Berkualitas;
4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadat Haji dan Umrah yang Berkualitas dan Akuntabel;
6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Umum dan Pendidikan Keagamaan;
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya

B.3 Visi Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Agama RI Tahun 2015 -2019 maka visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019 adalah:

“ SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT”

B.4 Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka telah ditetapkan pula Prioritas Pembangunan yang ditujukan pada :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

D. Tujuan

D.1 Tujuan Kementerian Agama

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), dan pendidikankeagamaan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015- 2019 adalah:

- TA.1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
- TA.2 Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunannasional;
- TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;

- TA.4 Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan;
- TA.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- TA.6 Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah:

- TP.1 Peningkatan akses pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
- TP.2 Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.

D.1 Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan. Tujuan pembangunan di bidang agama untuk periode 2015-2019 antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan;
2. Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.

Adapun untuk tujuan pembangunan dibidang pendidikan untuk periode 2015-2019 antara lain:

1. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam.
2. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam.
3. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah.

E. Sasaran

E.1 Sasaran Kementerian Agama

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama, dan sasaran bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (TA.1) adalah meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Keshalihan Sosial yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan.
2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama yang mencakup komponen: (a) Toleransi, (b) Kesetaraan, dan (c) Kerjasama.
3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas (TA.3) adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya Indeks Layanan Keagamaan pada masing-masing agama, yang mencakup komponen : (a) sarana dan prasarana ibadah, (b) penyuluh agama, (c) kitab suci, dan (d) lembaga sosial keagamaan;
 - b. meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan KUA;
 - c. meningkatnya Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan dan pengawasan produk halal.

4. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan (TA.4) adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana keagamaan dan meningkatnya perlindungan terhadap aset keagamaan yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya dana keagamaan yang dikelola oleh lembaga pengelola dana keagamaan; dan
 - b. meningkatnya jumlah aset keagamaan yang tersertifikasi.
5. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (TA.5) adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji dalam dan luar negeri;
 - b. meningkatnya predikat Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji dan Laporan Keuangan Dana Abadi Umat (DAU) hingga mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
6. Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama (TA.6) adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan:
 - a. dipertahankannya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama;
 - b. meningkatnya hasil penilaian Laporan Kinerja Kementerian Agama; dan
 - c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan (TP.1) adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya APK RA/Pratama Widya Pasraman;
 - b. meningkatnya APK MI/ Ula/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman;
 - c. meningkatnya APM MI/ Ula/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman;
 - d. meningkatnya APK MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman;
 - e. meningkatnya APM Mts/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman;

- f. meningkatnya APK MA/ Ulya/ Utama WidyaPasramanmeningkatnya APM MA/ Ulya/ Utama Widya Pasraman;dan
 - g. meningkatnya APK PTK/Ma'hadAly.
2. Sasaran terkait peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan (TP.2) adalah meningkatnya kompetensi dan kualitas kepribadian siswa, yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswaMTs;
 - b. meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MA;dan
 - c. meningkatnya Indeks Integritas Siswa.

E.2 Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun kedepan yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran terkait bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terkait bidang agama adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
- 2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
- 3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan.

Sedangkan untuk sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terkait dengan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah;
- 2. Sasaran terkait peningkatan angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah;

3. Sasaran terkait penurunan jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan;
4. Sasaran terkait peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan;
5. Sasaran terkait peningkatan proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama;
6. Sasaran terkait peningkatan ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat;
7. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama.

F. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor pendukung atau kunci keberhasilan pencapaian tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, diantaranya:

1. Keharmonisan dan kerukunan umat beragama ditengah keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat di lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
3. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama dan banyaknya tokoh-tokoh agama yang memberikan edukasi kepada masyarakat;
4. Optimalisasi struktur Kementerian Agama pada tingkat paling kecil dalam pemerintahan;
5. Berkembangnya lembaga-lembaga keagamaan dan tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
6. Berkembangnya jaringan teknologi informasi yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
7. Tingginya dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah serta meningkatnya jumlah madrasah yang dapat bersaing dengan sekolah umum;
8. Adanya perbaikan sistem dan penerapan teknologi informasi di berbagai aspek dalam peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

G. Lingkungan yang berpengaruh

Permasalahan Utama (Strategic Issued) Tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari isu-isu yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tantangan dan permasalahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya yang tidak merata Sumatera Utara menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin tinggi. Pada tahun 2025 Sumatera Utara diperkirakan memiliki jumlah penduduk sekitar 52,7 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk dengan persebarannya yang tidak merata mengakibatkan wilayah cakupan pembinaan keagamaan menjadi lebih luas dan kuantitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan Persebaran penduduk yang tidak merata antara kabupaten dan kota yang ada dapat berpengaruh juga pada aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, hal ini terlihat dari perbandingan APM dan APK setiap jenjang pendidikan. Selain itu, angka putus sekolah pada Provinsi Sumatera Utara juga masih relatif tinggi. Dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memiliki tanggung Jawab untuk lebih meningkatkan akses pendidikan masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang dimiliki dengan keterbatasan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan di madrasah pada saat ini.
3. Masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai agama dengan perilaku sosial masyarakat Sumatera Utara merupakan daerah penyangga ibu kota negara dan lintasan Sumatera, hal ini menyebabkan tingkat kriminalitas, kasus-kasus asusila dan pelanggaran hukum masih cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan heterogen dapat berpotensi menimbulkan berbagai masalah/konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara harus berupaya meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial tersebut dengan pendekatan pelayanan agama atau pendidikan agama dan keagamaan.

4. Rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung program kerukunan dan berkembangnya kelompok yang mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama. Protes ketidakpuasan yang berujung pada pengrusakan fasilitas umum masih kerap terjadi, keragaman budaya dan agama serta kondisi politik yang ada juga dapat berpotensi menimbulkan banyaknya konflik sosial dan disintegrasi.
5. Permasalahan lembaga penyelenggaraan haji dan Umrah. Belum seluruhnya penyelenggaraan haji dan umrah yang terbina serta maraknya kasus penipuan terkait penyelenggara haji dan umrah di wilayah Provinsi Sumatera Utara mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada profesionalitas/kinerja pelayanan haji dan umrah yang dilakukan oleh ASN yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
6. Kualitas kinerja yang masih belum memadai. Rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasioanl Prosedur (SOP) dalam bidang pelayanan keagamaan, serta kurangnya profesionalitas aparatur yang dimiliki berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019, yang akan dilaksanakan berbagai kegiatan tahunan. Hal ini Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi Di dalam rencana indikator kinerja yang dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja yang untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahunan yang bersangkutan, program, dan kegiatan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 disusun untuk mampu menterjemahkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019. Penyusunan ini bertujuan untuk merumuskan kembali komitmen untuk melaksanakan program demi pencapaian sasaran yang telah terumuskan.

A. Sasaran Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Sasaran Kinerja yang akan dicapai Tahun 2019 kedepan yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran terkait bidang pendidikan.

Sasaran Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terkait bidang agama adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
3. Meningkatnya kulaitas pelayanan keagamaan

Sedangkan untuk Sasaran Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terkait dengan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah;
2. Sasaran terkait peningkatan angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah;
3. Sasaran terkait penurunan jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan;
4. Sasaran terkait peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan;
5. Sasaran terkait peningkatan proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum;
6. Sasaran terkait peningkatan ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat;
7. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama antara.

B. Program

Program yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara untuk merealisasikan arah kebijakan Kementerian Agama dituangkan dalam 9 (Sembilan) program pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama mulai dari tingkat wilayah sampai dengan Kabupaten/kota.

Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

- a. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
- b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- d. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Pembinaan Administrasi Hukum dan Kerjasama Luar negeri(KLN);
- f. Pembinaan Administrasi Umum; dan
- g. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

2. Program Kerukunan Umat Beragama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu program kerukunan umat beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

Ada dua kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai sasaran program kerukunan umat beragama, yaitu:

- a. Pembinaan Kerukunan Hidup beragama;
- b. Pembinaan administrasi kerukunan hidup umat beragama.

3. Program Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada kementerian agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tatakelola pendidikan umat islam.

Ada 4 Kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai sasaran program pendidikan islma, yaitu:

1. Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan agama islam;
2. Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan keagamaan Islam;
3. Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi RA/BA dan masrasah;
4. Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam.

4. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaran ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jamaah, pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah, serta didukung system informasi yang memadai dan tata kelola yang baik dan bersih.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran program penyelenggaraan haji dan umrah yaitu:

1. Pelayanan Haji dalam negeri;
2. Pembinaan haji dan umrah;
3. Pengelolaan dana haji;
4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tekhnis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;

5. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat islam.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai sasaran program bimbingan masyarakat islam, yaitu:

1. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf;
2. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat;
3. Pengelolaan dan pembinaan penerangan Agama Islam;
4. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kependidikan keagamaan masyarakat Kristen.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai sasaran program bimbingan masyarakat Kristen, yaitu:

1. Pengelolaan dan pembinaan Urusan Agama Kristen;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;
3. Penyelenggaraan Administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Kristen;
4. Dukungan Manajemen dan Tugas teknis Lainnya Bimas Kristen.

7. Program Bimbingan Masyarakat Katholik

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kependidikan keagamaan masyarakat Katholik.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai sasaran program bimbingan masyarakat Katholik, yaitu:

1. Pengelolaan dan pembinaan Urusan Agama Katholik;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katholik;
3. Penyelenggaraan Administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Katholik;
4. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Bimas Katholik.

8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kependidikan keagamaan masyarakat Hindu.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. dalam rangka mencapai sasaran program bimbingan masyarakat Hindu, yaitu:

1. Pengelolaan dan pembinaan Urusan Agama Hindu;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu;
3. Penyelenggaraan Administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Hindu;
4. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Bimas Hindu.

9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kependidikan keagamaan masyarakat Buddha.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai sasaran program bimbingan masyarakat Buddha, yaitu:

1. Pengelolaan dan pembinaan Urusan Agama Buddha;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha;
3. Penyelenggaraan Administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Buddha;
4. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Bimas Buddha.

C. URAIAN KEGIATAN

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama yang dilaksanakan melalui :
 - a. Kegiatan Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN;
 - b. Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN;
 - d. Kegiatan Pembinaan Administrasi Perencanaan;
 - e. Kegiatan Pembinaan Administrasi Umum;
 - f. Kegiatan Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.
2. Program Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan melalui :
 - a. Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu;
 - b. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
3. Program Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan melalui :
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
 - b. Kegiatan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
4. Program Bimbingan Masyarakat Kristen yang dilaksanakan melalui :
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen.
5. Program Bimbingan Masyarakat Katolik yang dilaksanakan melalui
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
 - b. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik;
 - c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik.

6. Program Bimbingan Masyarakat Hindu yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu.
7. Program Bimbingan Masyarakat Buddha yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha.
8. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang dilaksanakan melalui :
 - a. Pelayanan Haji dalam Negeri;
 - b. Pembinaan Haji;
 - c. Pengelolaan Dana Haji an Sistem Informasi Haji;
 - d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

D. TARGET

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mempunyai target capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		
1	Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama	a	Jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah	10,193,368	Orang
		b	Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan	13,000	Lembaga
2	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat	a	Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama	-	Konflik
		b	Indeks kerukunan umat beragama tingkat Provinsi	85.00	Angka
3	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	a	Jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi	33,000	Lembaga
		b	Jumlah penyuluh agama yang memenuhi	5,540	Orang
		c	Jumlah KUA yang memenuhi standar	380	Lembaga
		d	Jumlah Penghulu yang memenuhi standar	400	Orang
		e	Indeks kepuasan layanan Jemaah Haji dalam negeri tingkat Provinsi	-	Angka
4	Meningkatnya akses layanan pendidikan	a	AP KRA/ P rata ma Widya P as raman	8.50	%
		b	AP K MI/Ula/SDTK/Adhi Widya P as raman	10.00	%
		c	AP K MTs /Wus tha/SMP TK/Madyama Widya P as raman	29.50	%
		d	AP K MA/Ulya/SMTK/Utama Widya P as raman	13.00	%
		e	AP M MI/Ula/SDTK/Adhi Widya P as raman	10.00	%
		f	AP M MTs /Wus tha/SMP TK/Madyama Widya P as raman	29.50	%
		g	AP M MA/Ulya/SMTK/Utama Widya P as raman	13.00	%
		h	AP K P TK/ Ma'had Aly/P TK	-	%
5	Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan	a	Rerata nilai ujian seko lah MTs	8.61	Angka
		b	Rerata nilai ujian seko lah MA	8.00	Angka
		c	Indeks Integritas Siswa	82	Angka

BAB III ANGGARAN

A. JUMLAH ANGGARAN

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mempunyai Pagu Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 3.081.076.266.000,- (Tiga trilyun delapan puluh satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah,-) dengan rincian per program adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 75,982,357,000
2	Kerukunan Umat Beragama	Rp 3,520,600,000
3	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 225,123,152,000
4	Pendidikan Islam	Rp 2,284,259,598,000
5	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 355,934,885,000
6	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 89,110,466,000
7	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 4,233,014,000
8	Bimbingan Masyarakat Budhha	Rp 6,541,243,000
9	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 36,370,951,000
	Jumlah Seluruh	Rp 3,081,076,266,000

B. RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN

Bulan	Bagian (DIPA)	Pagu
Januari	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 6,331,863,083
	Kerukunan Umat Beragama	Rp -
	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 6,253,208,453
	Pendidikan Islam	Rp 98,141,986,600
	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 172,106,988
	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 6,237,732,620
	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 296,310,980
	Bimbingan Masyarakat Budhha	Rp 175,770,337
	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 2,545,966,570
Pebruari	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 7,040,899,336
	Kerukunan Umat Beragama	Rp -
	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 12,967,796,839
	Pendidikan Islam	Rp 133,248,476,550
	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 174,313,988
	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 6,237,732,620
	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 296,310,980
	Bimbingan Masyarakat Budhha	Rp 823,119,721
	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 2,545,966,570
Maret	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 6,826,603,893
	Kerukunan Umat Beragama	Rp -
	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 15,903,795,627
	Pendidikan Islam	Rp 152,283,973,200
	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 198,754,988
	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 7,128,837,280
	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 338,641,120
	Bimbingan Masyarakat Budhha	Rp 1,275,853,368
	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 2,909,676,080
April	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 7,031,196,255
	Kerukunan Umat Beragama	Rp -
	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 19,093,681,213
	Pendidikan Islam	Rp 161,801,721,525
	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 388,120,988
	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 8,911,046,600
	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 423,301,400
	Bimbingan Masyarakat Budhha	Rp 1,645,500,285
	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 3,637,095,100

Bulan	Bagian (DIPA)	Pagu
Mei	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 7,646,684,544
	Kerukunan Umat Beragama	Rp -
	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 33,801,101,843
	Pendidikan Islam	Rp 209,390,463,150
	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 1,243,031,988
	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 9,802,151,260
	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 465,631,540
	Bimbingan Masyarakat Budhha	Rp 745,426,914
	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 4,000,804,610
Juni	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 6,919,202,133
	Kerukunan Umat Beragama	Rp -
	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 15,736,881,665
	Pendidikan Islam	Rp 180,837,218,175
	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 829,509,988
	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 10,693,255,920
	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 507,961,680
	Bimbingan Masyarakat Budhha	Rp 446,136,927
	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 4,364,514,120
Juli	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 6,987,299,520
	Kerukunan Umat Beragama	Rp -
	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 20,227,781,060
	Pendidikan Islam	Rp 190,354,966,500
	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 686,646,988
	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 11,584,360,580
	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 550,291,820
	Bimbingan Masyarakat Budhha	Rp 238,239,241
	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 4,728,223,630
Agustus	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 5,490,413,775
	Kerukunan Umat Beragama	Rp -
	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 775,743,500
	Pendidikan Islam	Rp 228,425,959,800
	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 1,210,513,988
	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 11,584,360,580
	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 38,520,427
	Bimbingan Masyarakat Budhha	Rp 330,975,654
	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 36,370,951,000

Bulan	Bagian (DIPA)	Pagu
September	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 5,490,413,775
	Kerukunan Umat Beragama	Rp 1,327,550,000
	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 20,227,781,060
	Pendidikan Islam	Rp 218,908,211,475
	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 1,030,937,988
	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 4,455,523,300
	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 211,650,700
	Bimbingan Masyarakat Budhha	Rp 238,239,241
	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 2,545,966,570
Oktober	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 5,490,413,775
	Kerukunan Umat Beragama	Rp 712,956,500
	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 20,227,781,060
	Pendidikan Islam	Rp 247,461,456,450
	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 1,230,032,988
	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 4,455,523,300
	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 211,650,700
	Bimbingan Masyarakat Budhha	Rp 238,239,241
	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 2,909,676,080
Nopember	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 5,490,413,775
	Kerukunan Umat Beragama	Rp -
	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 20,227,781,060
	Pendidikan Islam	Rp 256,496,953,100
	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 1,116,805,988
	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 3,564,418,640
	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 211,650,700
	Bimbingan Masyarakat Budhha	Rp 238,239,241
	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 2,214,990,916
Desember	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 5,490,408,189
	Kerukunan Umat Beragama	Rp 704,350,000
	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 20,227,781,060
	Pendidikan Islam	Rp 206,908,211,475
	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 985,263,988
	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 4,455,523,300
	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 681,091,953
	Bimbingan Masyarakat Budhha	Rp 238,239,243
	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 3,637,095,100

C. JADWAL PELAKSANAAN ANGGARAN

Bulan		Kegiatan	Pagu
Januari	1	Pemantauan Pelaksanaan Pendirian RA/Madrasah	Rp 30,000,000
Pebruari	1	Bimtek Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 82,250,000
	2	Penyusunan dan Perakitan Soal USBN	Rp 148,078,000
	3	Pemantauan Pelaksanaan EMIS Madrasah	Rp 30,000,000
	4	Workshop Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) Guru PAI Angkatan I	Rp 148,250,000
	5	Workshop Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) Guru PAI Angkatan II	Rp 148,250,000
	6	Workshop Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) Guru PAI Angkatan II	Rp 148,250,000
	7	Rapat Koordinasi BOS Pondok Pesantren Salafiyah Tahun 2019	Rp 148,250,000
	8	Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Rp 133,450,000
Maret	1	Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Humanis	Rp 120,157,000
	2	Pembinaan Keluarga Hittasukhaya	Rp 25,241,000
	3	Pembinaan Manajemen Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha	Rp 146,478,000
	4	Pembinaan Karakter Peserta Didik Bimas Buddha	Rp 14,426,000
	5	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama	Rp 25,241,000
	6	Pemantauan Pelaksanaan UKM Madrasah	Rp 30,000,000
	7	Workshop Penguatan Islam Washatiyah Siswa	Rp 157,800,000
	8	Rapat Koordinasi Persiapan UPK dan USBN Pendidikan kesetaraan	Rp 148,250,000
	9	Manajemen Pengelola PBSB	Rp 54,930,000
	10	Pembinaan dan Pemberdayaan Komite Madrasah	Rp 148,250,000
	11	Pembinaan dan Pemberdayaan serta Pengelolaan RA	Rp 148,250,000
	12	Monitoring dan Evaluasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 50,000,000
	13	Rapat Koordinasi Bidang Pakis	Rp 151,600,000

Bulan		Kegiatan	Pagu
April	1	Laporan Penyusunan laporan Keuangan	Rp 85,650,000
	2	Pembinaan Qori qoiah dan Hafidzh Hafidzah Zona III	Rp 35,000,000
	3	Sinkronisasi dan Evaluasi Program Zakat	Rp 40,000,000
	4	Pembinaan Qori qoiah dan Hafidzh Hafidzah Zona II	Rp 34,000,000
	5	Pemetaan Wilayah Dakwah	Rp 25,000,000
	6	Verifikasi dan Pendataan Bantuan	Rp 7,070,000
	7	Visitasi LAZ Skala Kab/Kota	Rp 25,000,000
	8	Monitoring kerjasama Tanah Wakaf	Rp 20,000,000
	9	Workshop Peningkatan Wawasan Islam Rahmatan Lil A'lamin	Rp 157,800,000
	10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan USBN	Rp 100,000,000
	11	Workshop Penguatan Jejaring Organisasi PAI Angkatan I	Rp 105,000,000
	12	Workshop Penguatan Jejaring Organisasi PAI Angkatan II	Rp 105,000,000
	13	Workshop Penyusunan Master soal UPK/USBN Pendidikan Kesetaraan TK. Ula	Rp 148,250,000
	14	Workshop Penyusunan Master soal UPK/USBN Pendidikan Kesetaraan TK. Wustha	Rp 148,250,000
	15	Pemantauan Pelaksanaan Pendirian Akreditasi dan EMIS Madrasah	Rp 120,000,000
	16	Rapat Koordinasi Persiapan	Rp 96,000,000
	17	Sosialisasi Penulisan Ijazah dan SKHUAM Tahun 2019	Rp 75,114,000
	18	Rapat Koordinasi UAMBN	Rp 16,200,000
	19	Bimbingan Implementasi Penilaian Berbasis Komputer	Rp 148,755,000
	20	Pembinaan dan Pengembangan kualitas penyuluh	Rp 75,000,000
	21	Pembinaan Keluarga Sukinah	Rp 94,225,000

Bulan		Kegiatan	Pagu
Mei	1	Pembinaan Guru Bidang Studi PAK Tingkat SD	Rp 147,410,000
	2	Pembinaan Guru Bidang Studi PAK Tingkat SMP	Rp 147,410,000
	3	Koordinasi bersama KKG PAK Tingkat Dasar	Rp 116,632,000
	4	Pembinaan Guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen	Rp 147,410,000
	5	Pertemuan Pejabat Bimas Kristen LPPD_SU dan LPPD Kab/Kota	Rp 94,723,000
	6	Pembinaan Guru Bidang Studi PAK Tingkat SMA	Rp 147,410,000
	7	Penguatan Operator EMIS Penmad	Rp 119,700,000
	8	Workshop Penyusunan Soal UASBN PAI Tahun 2019	Rp 148,250,000
	9	Workshop evaluasi pelaksanaan UASBN PAI Tahun 2019	Rp 148,250,000
	10	Bantuan Rehabilitasi Asrama Pontren	Rp 425,000,000
	11	Bantuan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah/RA	Rp 100,000,000
		Bimbingan Teknis Pelaporan Dana BOP RA Tahun Anggaran 2019	Rp 123,870,000
	12	Penyusunan Pengembangan Kurikulum Madrasah	Rp 195,420,000
	13	Monitoring UAMBN Tk. Madrasah	Rp 45,000,000
	14	Pengadaan Meubelair dan Multimedia Ruangan	Rp 72,000,000
	15	Monitoring UN Tk. MTS MA dan USBN MI Tahun 2019	Rp 65,280,000
	16	Finalisasi dan Evaluasi Data EMIS Pakis Semester Genap	Rp 155,120,000
	17	Meubelair Ruang GTK	Rp 105,000,000
	18	Peningkatan Kapasitas Admin Simpatika Guru Pakis	Rp 112,500,000
19	Peningkatan Kompetensi Guru Agama Hindu	Rp 75,000,000	

Bulan		Kegiatan	Pagu
Juni	1	Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen Wilayah Kepulauan Nias	Rp 68,419,999
	2	Rapat Persiapan Pemilihan PAI PNS dan Non PNS	Rp 500,000
	3	Pemilihan Penyuluh Teladan PNS dan Non PNS	Rp 117,780,000
	4	Pengkaderan Calon Mubalig	Rp 100,000,000
	5	Pendampingan STQN Tk. Nasional Kalimantan Barat	Rp 62,649,000
	6	Bantuan Operasional Baznas Nasional	Rp 100,000,000
	7	Pembinaan dan Pemberdayaan Komite Madrasah	Rp 148,250,000
	8	Workshop Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Angkatan III	Rp 148,250,000
	9	Workshop Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Angkatan IV	Rp 148,250,000
	10	Workshop Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru PAI	Rp 148,250,000
	11	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UPK/USBK Kesetaraan	Rp 48,000,000
	12	Bimtek Penyusunan RPP	Rp 159,335,000
	13	Layananan pendukung Sarana Prasarana Perencanaan 2020	Rp 192,000,000
	14	Meubelair Ruang Sarana Prasarana Penmad	Rp 101,268,000
	15	Seleksi Jambore Pasraman Tk. Provinsi	Rp 304,630,000
	16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Minggu/Pasraman	Rp 25,000,000
	17	Pengembangan dan Pembinaan Sangraha Pinandita dan Sarati Banten sebagai tenaga Rohaniawan	Rp 100,000,000

Bulan		Kegiatan	Pagu
Agustus	1	Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen se Provinsi Sumatera Utara	Rp 147,410,000
	2	Bantuan Rehab Rumah Ibadah Bimas Kristen	Rp 1,550,000,000
	3	PIP	Rp 600,200,000
	4	Dana BOS	Rp 1,388,000,000
	5	RKB	Rp 600,000,000
	6	Koordinasi bersama MGMP PAK tingkat Menengah	Rp 116,632,000
	7	Tunjangan Penyuluh Agama Khonghucu Non PNS	Rp 48,000,000
	8	Bantuan Insentif Guru Agama Khonghucu Non PNS	Rp 8,000,000
	9	Bantuan Operasional BWI perwakilan Provinsi	Rp 100,000,000
	10	Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Guru PAI	Rp 75,900,000
	11	Bantuan Pemberdayaan Lembaga Rohis SMA/SMK	Rp 75,000,000
	12	Bantuan Meubelair Asrama Pondok Pesantren	Rp 100,000,000
	13	Bantuan Pembangunan Asrama Pontren	Rp 680,000,000
	14	Meubelair Ruangan Kelembagaan	Rp 125,000,000
	15	Perangkat Pengolah Data Seksi Kelembagaan	Rp 35,000,000
	16	Dana UAMBN Tk. MTS	Rp 1,234,956,000
	17	Dana UAMBN Tk. MA	Rp 599,379,000
	18	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran MAN Se-Sumatera Utara Tahun 2020	Rp 306,360,000

Bulan		Kegiatan	Pagu
September	1	Koordinasi Penguatan Program dan Anggaran Bimas Kristen Aplikasi RKAKL	Rp 188,344,000
	2	Sosialisasi Penyusunan Keputusan dan IHL pada Kemenag	Rp 64,800,000
	3	Sarasehan Upaya pencegahan dan penanganan Konflik Umat Beragama	Rp 400,000,000
	4	Bapem Operasional KUB	Rp 60,000,000
	5	Publikasi Kampanye Hidup Rukun	Rp 23,400,000
	6	Pemantauan Pelaksanaan Akreditasi Madrasah	Rp 30,000,000
	7	Pengembangan Rohis Tingkat Provinsi Sumatera Utara	Rp 148,250,000
	8	Pentas PAI Tingkat Provinsi Sumatera Utara	Rp 398,230,000
	9	Workshop Peningkatan Kualitas Guru Madrasah	Rp 77,475,000
	10	Orientasi Peningkatan Kualitas Guru TKQ/TPQ	Rp 64,605,000
	11	Kompetisi dan Apresiasi bagi Siswa Madrasah	Rp 433,160,000
	12	Rapat Koordinasi Penyerapan dan Penyesuaian Revisi	Rp 166,910,000
	13	Rembug Nasional Perencanaan Pendidikan Islam Tahun 2019	Rp 368,414,000
	14	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran MTSN Se-Sumatera Utara Tahun 2020	Rp 386,010,000
	15	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Kemenag Penmad Se-Sumatera Utara Tahun 2020	Rp 250,240,000

Bulan		Kegiatan	Pagu
Oktober	1	Pembinaan Keluarga Kristiani	Rp 97,131,000
	2	Pembinaan dan Pemberdayaan serta Pengelolaan RA	Rp 148,250,000
	3	Pengiriman Peserta Pentas PAI	Rp 271,150,000
	4	Orientasi Pengembangan Manajemen Pondok Pesantren	Rp 76,925,000
	5	Orientasi Peningkatan Kualitas Guru Kitab Kuning	Rp 77,475,000
	6	Manajemen Pengelola Bantuan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren 2019	Rp 77,475,000
	7	Rapat Koordinasi Penilaian Angka Kredit Perencana Pendidikan Islam	Rp 17,973,000
	8	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan	Rp 100,000,000
	9	Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah	Rp 205,000,000
Nopember	1	Pengiriman Santri kegiatan Pospenas ke Jawa Barat	Rp 175,000,000
	2	Pemberian Bantuan Operasional Parisadha Hindu Dharma Indonesia	Rp 25,000,000
	3	Penyelenggaraan Dialog Kerukunan Pandita/Pinandita/Tokoh Agama/Cendekiawan/Tokoh Masyarakat/Pemuda/Wanita	Rp 55,000,000
Desember	1	Insentif Guru Non PNS Bimas Kristen	Rp 471,000,000
	2	Bantuan Insentif Guru Agama Khonghucu Non PNS	Rp 5,000,000
	3	BOP Pakis	Rp 650,000,000
	4	Bantuan PIP santri Ula	Rp 78,750,000
	5	Bantuan PIP Santri Wustha	Rp 1,192,500,000
	6	Bantuan PIP Santri Ulya	Rp 55,000,000
	7	BOP Siswa RA	Rp 13,218,750,000

BAB III

P E N U T U P

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2019 ini dibuat berdasarkan RENSTRA Tahun 2015-2019, dengan adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) diharapkan dapat merealisasikan 90% dari kegiatan dalam Draft Rancangan Strategis sebagai dokumen perencanaan teknis yang memuat nama-nama kegiatan, biaya dan output dari kegiatan tahunan yang sekaligus merupakan rencana yang disusun sebagai turunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu satu tahun.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran strategis pencapaiannya, dokumen ini memuat program-program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam jangka satu tahun dalam rangka kegiatan dapat diukur capaian kinerja dimana pada Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 9 program dan 9 kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan visi dan misi melalui pemantapan system dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaa, dan peningkatan koordinasi antar isntansi terkait dengan demikian hal-hal terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Wilayah kementerian Agama Prov. Sumatera Utara Tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara.

Medan, Januari 2019
Kepala,



H. Iwan Zulhami, SH, M.AP

